

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Rizky, 2013, **Hubungan Antara Pemerintah Dengan Rakyat Dalam Konsep Demokrasi**, dalam <http://rizkyprasojo.blogspot.com>, Diakses 25 oktober2013.
- Aulia A. Nur, 2010, **analisis Yuridis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Profinsi Aceh Berdasarkan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh**, Tesis Fakultas Hukum< universitas Sumatera Utara Medan.
- Data Pokok APBN 2006–2012, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Penyusunan APBN, 2013, **Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia**, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- Fahrudi Farid, 2010, **Pengaruh Tarif Bea Masuk dalam Skema Asean-China Free Trade Area (ACFTA), Nilai Pabean, dan Jumlah Pemberitahuan Impor Barang terhadap Penerimaan Negara di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Surabaya**, program pasca sarjana Universitas narotama Surabaya.
- Ghozali Imam, 2006, **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**, Cetakan IV, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar. 2006. **Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 3 Jilid 2**. Jakarta : Erlangga. h. 71.
- Hamdi Aniza P., 2013, **Desentralisasi Pemerintahan: Desentralisasi Sistem Perpajakan dalam Meningkatkan Efisiensi Ekonomi Sektor Publik dan Kualitas Pelayanan Publik**, <http://www.google.com>, Diakses 5 Oktober 2013.
- Kurnia Rina A., 2010, **Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)**, Skripsi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Lestari Lis, 2013, **Pengertian dan Definisi Penelitian Kuantitatif**, <http://www.kamusq.com>, di akses 29 Nopember 2013.

- Metta & Siti, **Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat**, Jurusan Akuntansi S1, STIE MDP.
- Rinaldi Udin, 2012, **Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**, Volume 8, Nomor 2, STIE Indonesia.
- Sidik Machfud, 2002, **Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (*Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia*)**, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan RI.
- Sulistiyowati Diah, 2011, **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal**, Skripsi S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Suminto, 2004, **Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara**, Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen Anggaran, Depkeu).
- , , Nota Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002.
- , , Nota Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003.
- , , Nota Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004.
- , , Nota Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.
- , , Nota Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.
- , , Nota Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.

- _____, Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.
- _____, Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
- _____, Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- _____, Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.
- _____, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu.
- _____, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Dana Alokasi Umum daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang .
- _____, **Undang-Undang Dasar 1945**, diperbanyak oleh Pengacara-Konsultan Hukum RGS & Mitra.
- _____, **Analisis APBN**, dalam <http://www.google.com>, Diakses tanggal 5 Oktober 2013.